



## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 11 Maret 2016

Kepada  
Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
di –

TEMPAT

### SURAT EDARAN

**Nomor: 050/ 244 /BAPPEDA-I  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2017**

Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dengan ini disampaikan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017 dan rancangan awal RKPD Tahun 2017 sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menyampaikan rancangan Renja SKPD Tahun 2017 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahapan dan agenda penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 (Lampiran I dalam CD);
2. Rancangan Renja SKPD Tahun 2017 disusun dengan format dan sistematika yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja (Lampiran II, IIa, IIb dalam CD);
3. Dalam menetapkan alokasi pagu indikatif program dan kegiatan pada Rancangan Renja SKPD, agar menerapkan prinsip *money follow priority program* dengan mengacu kepada program prioritas yang termuat didalam Rancangan Awal RKPD dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi (Lampiran III, IIIa dalam CD);
4. Rancangan Renja SKPD tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling lambat tanggal 17 Maret 2016 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* untuk selanjutnya dibahas didalam Forum Holistik-Tematik dan Forum Gabungan SKPD.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
  
H. RUSTAM EFFENDI, SE.

Lampiran I  
 Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
 Nomor : 050/244/BAPPEDA-I  
 Tanggal : 11 Maret 2016

**TAHAPAN DAN AGENDA PENYUSUNAN RKPD  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 TAHUN 2017**

No	Tahapan	Agenda/Waktu
1	Pembentukan (Orientasi) Tim Penyusun RKPD	29 Januari
2	Audiensi Rancangan Awal RKPD	05 Februari
3	Forum Konsultasi Publik	17 Februari
4	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	29 Januari – 10 Maret
5	Surat Edaran Gubernur	11 Maret
6	Penyusunan Rancangan Renja SKPD	11 – 17 Maret
7	Forum SKPD (Rakornis/Rakortek SKPD Prov)	17 Februari – 11 Maret
8	Musrenbang Kabupaten/Kota	11 – 22 Maret .
9	Penyampaian Rancangan Renja SKPD ke BAPPEDA	17 Maret .
10	Forum Holistik – Tematik	21 – 24 Maret
11	Forum Gabungan SKPD	28 Maret – 1 April
10	Pra Trilateral Meeting (Bappeda Prov – SKPD Prov – Bappeda Kab/Kota)	4 April
11	Audiensi Tim Penyusun RKPD Prov dengan TAPD Prov	5 April
12	Bilateral Meeting (TAPD Prov – TAPD Kab/Kota)	6 – 7 April
13	Penyusunan Rancangan RKPD	7 – 11 April
14	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	12 April
15	Pelaksanaan Musrenbang Nasional	Minggu ke 3 – 4 April
16	Perumusan Rancangan Akhir RKPD	2 – 4 Mei
17	Audiensi Rancangan Akhir RKPD dengan DPRD	9 Mei
18	Pelaksanaan Pasca Musrenbang Provinsi	11 Mei
19	Finalisasi Rancangan Akhir RKPD	9 – 13 Mei
20	Penetapan Perkada RKPD	16 Mei
21	SK Kepala Daerah Pengesahan Renja SKPD	30 Mei

## **SISTEMATIKA RANCANGAN RENJA SKPD**

Secara normatif dan substantif, sistematika dan tata cara penyusunan Rancangan Renja SKPD berpedoman kepada :Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Secara umum, sistematika/susunan penyajian Rancangan Renja SKPD, sekurang-kurangnya memuat:

1. Pendahuluan;
2. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
3. Tujuan dan Sasaran;
4. Program dan kegiatan yang memuat:
  - a. Indikator kinerja;
  - b. Kelompok sasaran;
  - c. Lokasi kegiatan;
  - d. Kebutuhan dana indikatif;
  - e. Sumber dana.
5. Penutup.

Lampiran II.a  
 Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
 Nomor : 050/244 /BAPPEDA-I  
 Tanggal : 11 Maret 2016

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS**  
**SKPD:.....PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan .....													
	Bidang Urusan .....													
	Program													
	Kegiatan													
	Kegiatan													
	dst ...													
	Bidang Urusan .....													
	Program .....													
	dst ...													

....., tanggal .....

KEPALA SKPD .....  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

.....

( )

Cara Pengisian Form sebagai berikut.

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk Tahun Rencana.
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama program dan kegiatan prioritas rincian indikatif kegiatan prioritas yang menunjang prioritas program.
1. Nama program harus sesuai dengan program yang ada didalam RPJMD 2012-2017 yang akan dilaksanakan pada tahun 2017;
  2. Hindari penggunaan nama kegiatan yang outputnya sulit untuk diukur seperti: Fasilitasi, Operasionalisasi. Nama kegiatan harus merupakan cerminan dari *output* kegiatan tersebut. Contoh: Pengadaan Bibit Lada, Pembangunan Ruang Kelas, dsb.
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan, dalam hal ini adalah 13 Prioritas Provinsi, yaitu:
1. Pengembangan *One Village One Product (OVOP)* dan koperasi komoditi;
  2. Pengembangan Pariwisata;
  3. Penguatan *rural urban linkages*;
  4. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
  5. Program SATAM EMAS;
  6. Peningkatan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun;
  7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
  8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  9. Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks. Tambang;
  10. Pengendalian pemanfaatan ruang;
  11. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah;
  12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  13. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur.
- Kolom (4) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:
1. Meningkatnya pendapatan masyarakat
  2. Meningkatnya konsumsi masyarakat
  3. Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat
  4. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
  5. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
  6. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
  7. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam
  8. Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup
  9. Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang
  10. Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan.
  11. Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.
  12. Menguatnya tata kelola pemerintah daerah
  13. Terwujudnya pemerintahan yang demokratis
- Kolom (5) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Kolom (6) diisi dengan uraian tolok ukur hasil program dalam tahun rencana. Contoh: kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan SMP (sesuaikan dengan indikator program didalam RPJMD 2012-2017)
- Kolom (7) untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil atau capaian yang ditargetkan untuk setiap program didalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya.

- Kolom (8) diisi dengan uraian tolok ukur keluaran dari setiap kegiatan.  
Contoh: tersedianya ruang belajar bagi peserta didik SMP.
- Kolom (9) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari keluaran yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya. Contoh: 4 ruang belajar SMP.
- Kolom (10) diisi dengan uraian tolok ukur hasil dari setiap kegiatan. Contoh: tersedianya ruang belajar yang dapat menampung peserta didik SMP.
- Kolom (11) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran hasil yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya. Contoh: 4 ruang belajar untuk 160 peserta didik atau 80% dari target hasil/capaian program.
- Kolom (12) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
- Kolom (13) diisi dengan prakiraan kebutuhan dana tahun berikutnya (n+1) dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan untuk setiap program dan kegiatan
- Kolom (14) diisi dengan siapa yang bertanggungjawab kegiatan tersebut apakah: (1) dapat dilakukan oleh satu SKPD, tuliskan SKPDnya; (2) lintas SKPD; (3) lintas wilayah, yang diusulkan ke musrenbang provinsi/kabupaten/kota...\*)
- Kolom (15) diisi dengan apa sifat jenis kegiatan tersebut:
- a. sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-SKPD.
  - b. alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
  - c. baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra-SKPD dengan kriteria:
    - 1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
    - 2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra-SKPD;
    - 3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
    - 4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran RenstraSKPD

#### **CATATAN:**

Agar *softfile* Rencana Program Kegiatan Prioritas tersebut dibuat dalam format *Microsoft office excel*.

Lampiran II.b  
Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : 050/ 244 /BAPPEDA-I  
Tanggal : 11 Maret 2016

## FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA



## KERANGKA ACUAN KERJA

**PA/KPA:** .....

SKPD : .....PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA KEGIATAN : .....

NAMA PROGRAM : .....

TAHUN ANGGARAN 2017

# KERANGKA ACUAN KERJA

Jenis Pekerjaan: .....

## 1. Latar Belakang

Menyampaikan informasi yang memuat indentifikasi permasalahan pembangunan yang terjadi sehingga kegiatan yang diusulkan merupakan representasi dari upaya penyelesaian masalah tersebut. Pernyataan masalah harus disertai dengan data dan informasi yang akurat dan valid supaya dapat dianalisis relevansinya dengan kegiatan yang diusulkan. Kegiatan yang disampaikan tanpa dukungan data, maka akan dianggap sebagai kegiatan yang tidak prioritas.

## 2. Maksud dan Tujuan

### 2.1 Maksud

Menjelaskan maksud dari dilaksanakannya kegiatan yang diusulkan.

### 2.2 Tujuan

Menjelaskan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan yang diusulkan, dikaitkan dengan penyelesaian permasalahan sebagaimana yang tertuang didalam bagian latar belakang.

## 3. Target/Sasaran

### 3.1 Keluaran (*Output*)

Menjelaskan keluaran yang dihasilkan dari kegiatan yang diusulkan. Penjelasan terhadap *output* kegiatan disertai dengan target kinerja *output* yang bersifat kuantitatif.

### 3.2 Hasil (*Outcome*)

Menjelaskan bagaimana relevansi *output* yang dihasilkan dari kegiatan yang diusulkan, dikaitkan dengan upaya untuk pencapaian indikator program, dan disertai dengan analisa sederhana yang menjelaskan seberapa besar secara kuantitatif *output* kegiatan tersebut diyakini dapat berkontribusi terhadap pencapaian indikator program.

### 3.3 Sasaran (*Impact*)

Menjelaskan relevansi indikator kegiatan (*output*) dan program (*outcome*) dalam mendukung indicator sasaran pembangunan.

## 4. Nama Organisasi

Memuat nama organisasi pelaksana

## 5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya Indikatif

Menjelaskan sumber pendanaan kegiatan (APBD/APBN). Sementara itu perkiraan biaya indikatif disusun berdasarkan kebutuhan riil dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai indicator output kegiatan.

Adapun perkiraan biaya disusun berdasarkan jenis belanja kedalam bentuk tabel sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rupiah)	Keterangan
Belanja Pegawai	Rp. ....	(menjelaskan rincian belanja yang akan dilakukan)
Belanja Barang dan Jasa	Rp. ....	(misal: untuk belanja ATK, Sewa kendaraan, Makan minum rapat, dsb)
Belanja Modal		
Jumlah Total	Rp. ,-	
Terbilang	.....	

Meskipun perkiraan biaya disusun hanya berdasarkan jenis belanja, namun diharapkan SKPD dapat menjelaskan rincian kebutuhan belanja apabila dirasakan perlu oleh tim pembahas.

## 6. Lokasi Kegiatan

Menjelaskan *locus* dari pelaksanaan kegiatan yang diusulkan, dengan menyertakan argumentasi kenapa kegiatan tersebut harus dilaksanakan ditempat yang direncanakan. Argumentasi harus disertai dengan data dan informasi yang jelas dan valid.

## 7. Tahapan dan Jangka Waktu Pelaksanaan

Menjelaskan secara logis tahapan pelaksanaan kegiatan yang disertai dengan rencana pelaksanaan dari setiap tahap yang akan dilalui.

NO	URAIAN	Bulan											
		Feb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6													
dst													

Pangkalpinang, .....

KEPALA .....

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

.....  
Pembina .....

NIP. ....

**Catatan:** Kerangka Acuan Kerja harus ditandatangani oleh Kepala SKPD

**KETERKAITAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN TARGET INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 – 2017  
 (IKU)**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun		
				Realisasi	Target	
				2015	2016	2017
Misi I: Mengembangkan ekonomi kerakyatan	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan Perkapita	44,887,151.41	48,038,718.83	51,190,286.26
		Meningkatnya konsumsi masyarakat	Daya Beli Masyarakat	653.55	657.22	660.88
			Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	32,686,522.00	34,154,307.98	35,672,093.76
		Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	66.70	67.03	67.08
	Persentase Wirausaha Baru (%)		3.40	5.40	6.40	
	Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	0.300	0.298	0.294
			Indeks Williamson	0.291	0.288	0.285
Misi II : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Memberdayakan masyarakat	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	71.82	73.72	77.32
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Angka melek huruf	97.63	98.24	98.50
			Angka rata-rata lama sekolah	7.90	8.01	8.11
			Angka Harapan Hidup (Tahun)	69.72	69.80	69.90
Misi III : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang	Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61.00	63.00	65.00
		Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup	Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	25.00	25.00	25.00
		Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100.00	100.00	100.00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun		
				Realisasi	Target	
				2015	2016	2017
Misi IV : Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Mengoptimalkan pemenuhan dan fungsi infrastruktur wilayah	Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan.	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (%)	96.73	93.50	95.00
			Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%)	80.00	85.00	100.00
			Rasio Elektrifikasi (%)	96.90	97.50	97.75
	Mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh.	Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan (%)	10.34	13.79	17.24
			Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan	-	1.00	1.00
Misi V : Mewujudkan <i>good governance</i> dalam rangka mencapai <i>clean government</i>	Menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Opini Audit BPK	WDP	WTP	WTP
			Penilaian akuntabilitas kinerja (skor)	60,96 (B)	65,00 (B)	70,00 (B)
			Indeks Reformasi Birokrasi	60.36	62.25	65.00
		Terwujudnya pemerintahan yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	75.50	76.00	76.50

## **PENDEKATAN HOLISTIK – TEMATIK, TERINTEGRASI DAN SPASIAL DALAM PENENTUAN PEMBIAYAAN PROGRAM PRIORITAS (MONEY FOLLOW PRIORITY PROGRAM)**

Pendekatan holistic – tematik dalam proses perencanaan dilandasi pada upaya percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan provinsi melalui pencapaian sasaran dan target indikator sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (IKU) (tematik).

Sangat disadari bahwa dalam pencapaian suatu prioritas dan sasaran pembangunan dibutuhkan sinergi antar beberapa SKPD melalui program-program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing (holistik).

Contoh: Pada Prioritas Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi terdapat 3 sasaran dengan 5 indikator sasaran yang harus dicapai. Guna pencapaian sasaran dan indicator sasaran yang terdapat didalam prioritas Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi tersebut, dibutuhkan sinergi beberapa SKPD, antara lain: Dinas KUMKM, Setda (Biro Perekonomian), Disperindag, BP2TPM, BKP, Dispertanbunnak, Dinas PU, Disnakertrans, Bappeda dan Sekretariat Bakorluh.

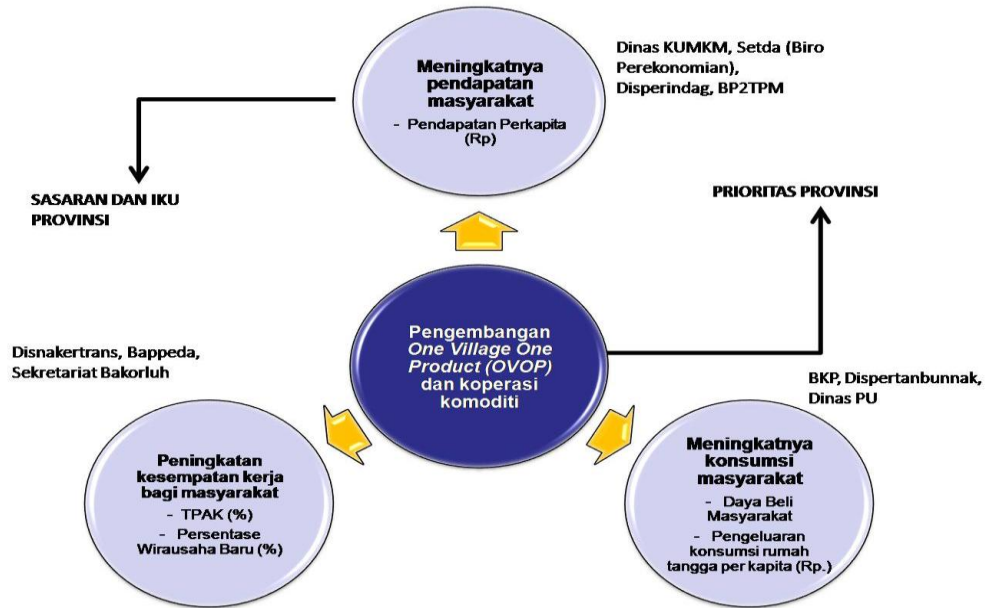
Secara visual, pendekatan perencanaan holistic – tematik dan pemetaan terhadap dukungan SKPD dalam pencapaian sasaran dan indicator sasaran dapat dilihat pada gambar berikut:

### **A. 13 Prioritas Pembangunan Provinsi**

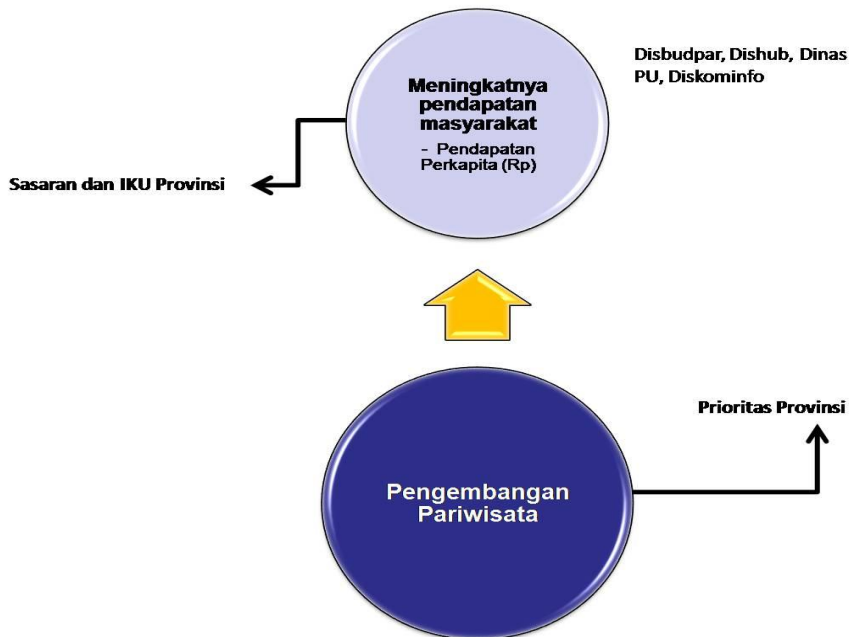


## B. Sasaran dan Indikator Sasaran pada Setiap Prioritas dan SKPD Pendukung

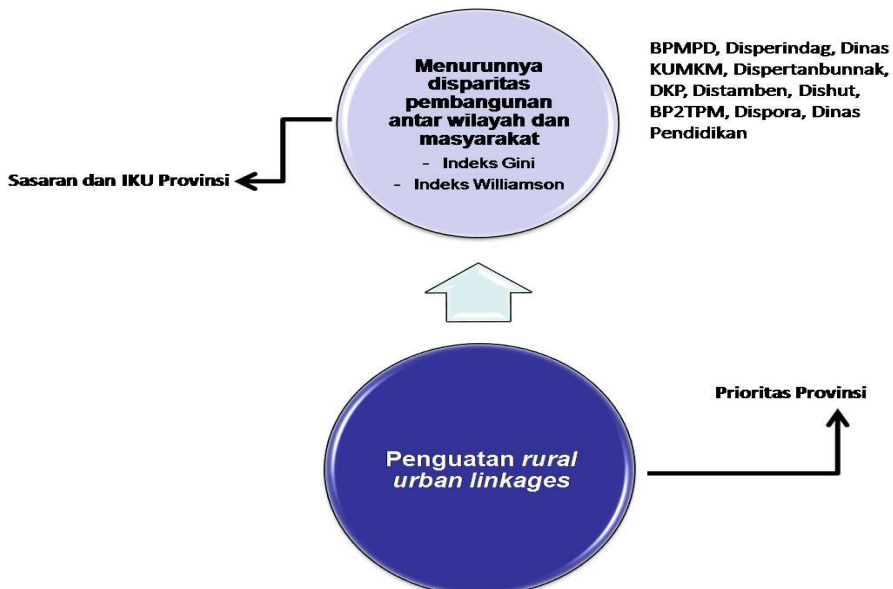
### 1. Prioritas OVOP dan Koperasi Komoditi:



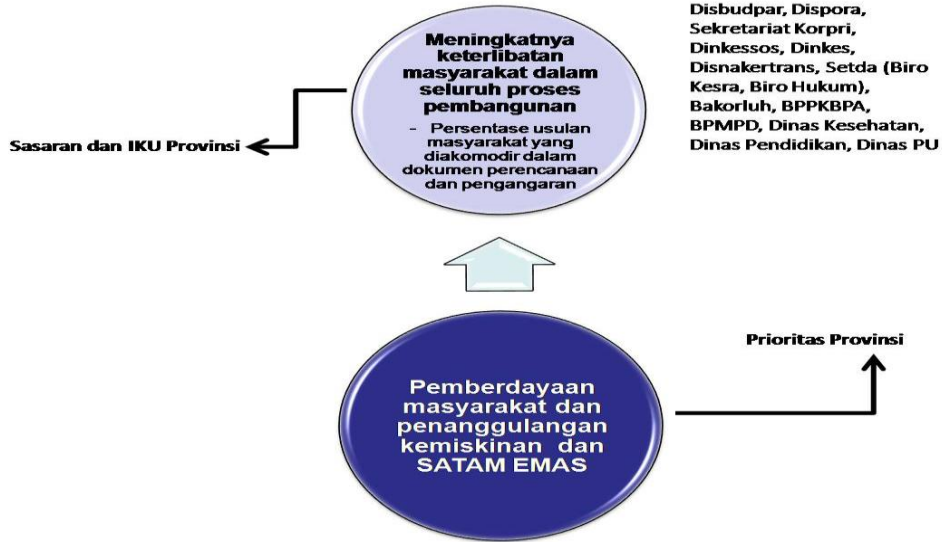
### 2. Prioritas Pengembangan Pariwisata



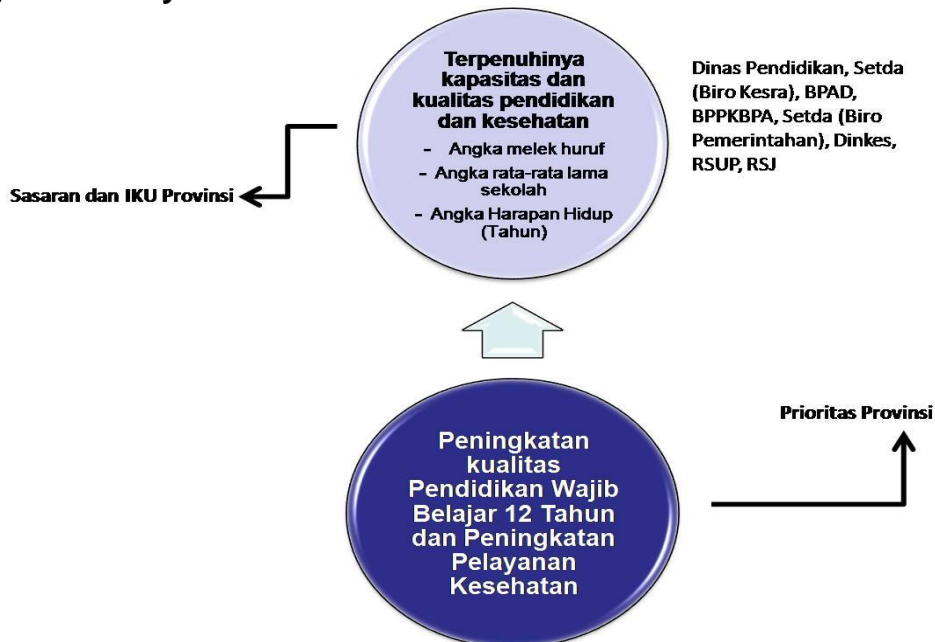
### 3. Prioritas Penguatan rural urban linkages



#### 4. Prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan dan Prioritas SATAM EMAS



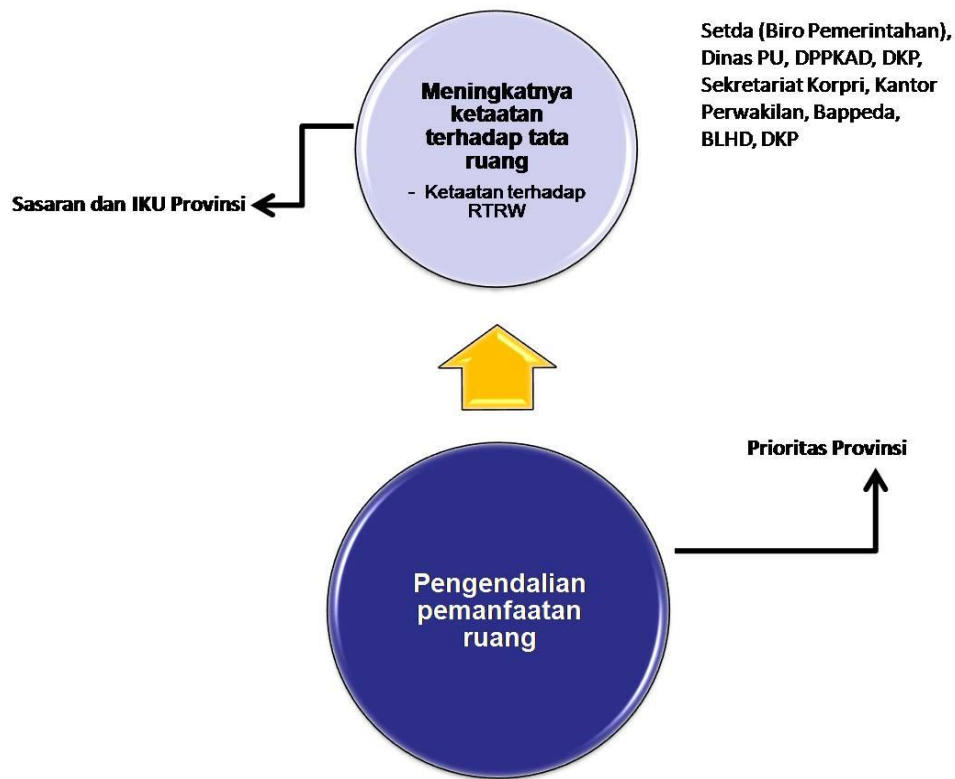
#### 5. Prioritas Peningkatan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun dan Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan



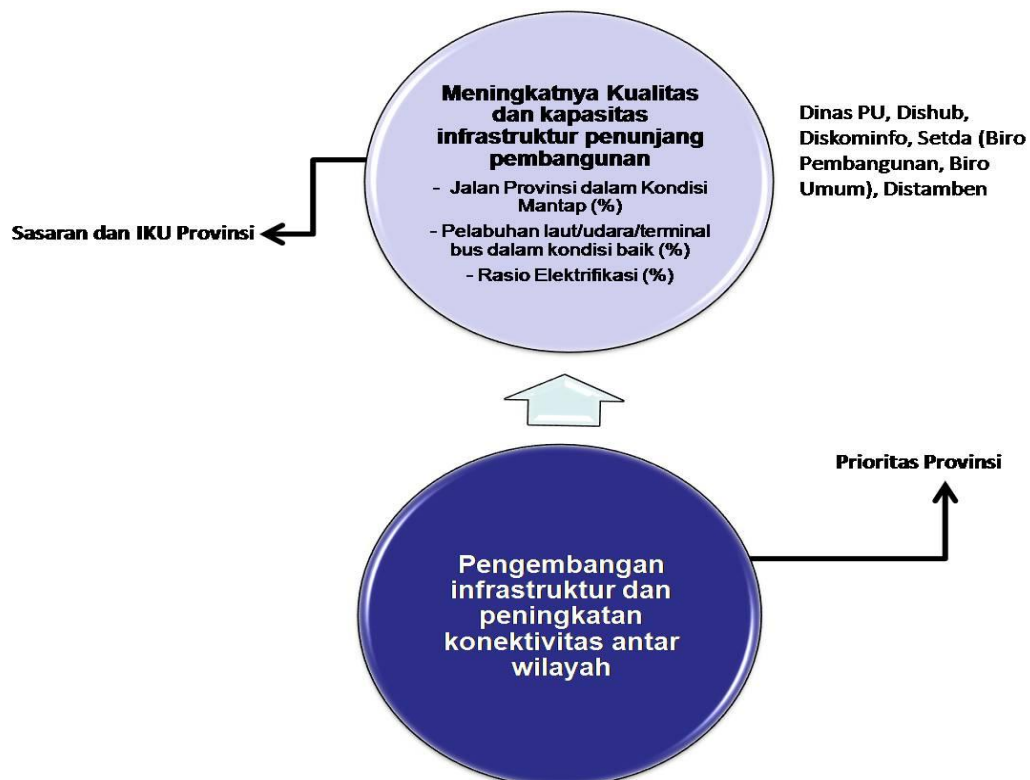
#### 6. Prioritas Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Prioritas Fasilitas Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks Tambang



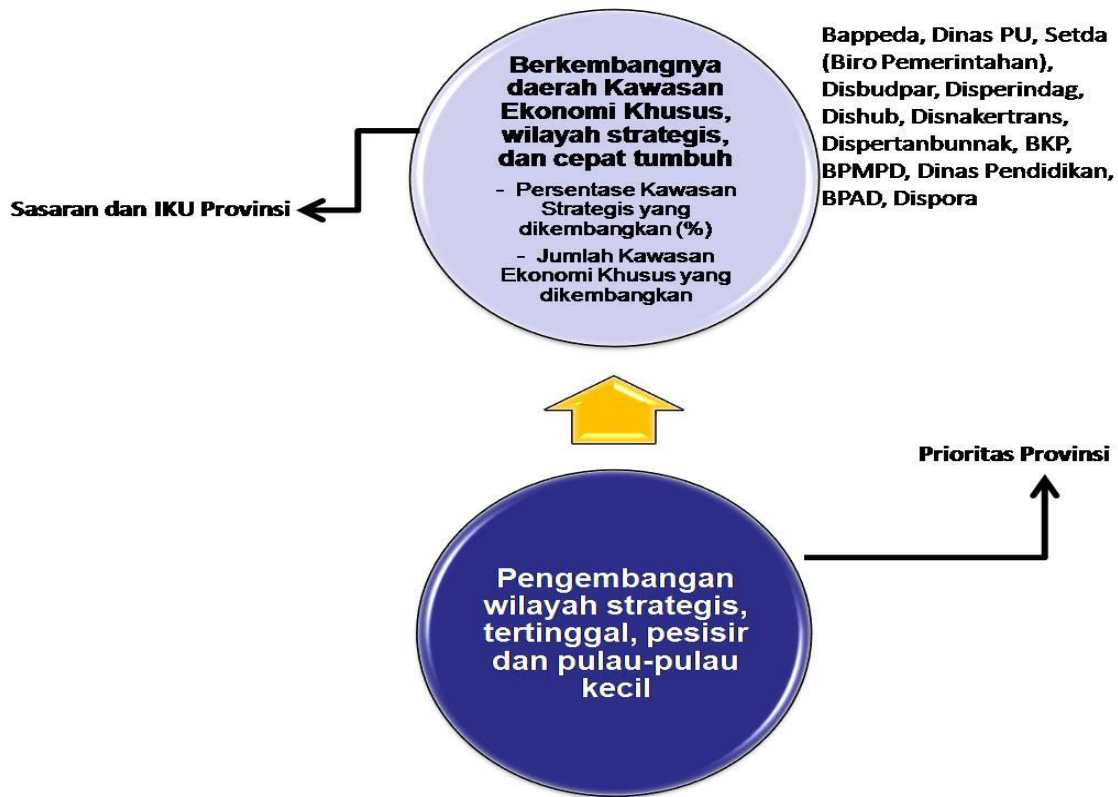
## 7. Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang



## 8. Prioritas Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antarwilayah



9. Prioritas Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil



10. Prioritas Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

